



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara dan merupakan pendapatan utama untuk membangun negara Indonesia. Penerimaan negara terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Terjadi kenaikan penerimaan perpajakan dari tahun ke tahun adalah hal baik bagi pemerintah dan rakyatnya. Hal ini terlihat dari realisasi penerimaan negara khususnya penerimaan yang bersumber dari pajak. Berikut adalah realisasi perkembangan penerimaan negara dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.1
Realisasi Perkembangan Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Realisasi Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.284.970,10	261.976,30	8.987,70	1.555.934,20	82,585%
2017	1.343.529,80	311.216,30	11.629,80	1.666.375,90	80,626%
2018	1.548.485,00	349.158,30	5.383,20	1.903.026,50	81,369%

Sumber: www.bps.go.id

Jika diperhatikan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016, jumlah penerimaan yang bersumber dari pajak dari tahun 2016 adalah sebesar Rp 1.284.970,10 miliar ini

mengalami peningkatan hingga menjadi 1.548.485,00 di tahun 2018. Pada Tabel 1.1 juga menunjukkan bahwa sektor perpajakan memiliki kontribusi yang paling besar dalam hal penerimaan negara, hal ini dikarenakan penerimaan negara didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak. Berdasarkan Tabel 1.1, bisa disimpulkan bahwa kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan kewajiban perpajakannya sudah cukup baik karena mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Meskipun penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya, anggaran penerimaan yang telah dirumuskan oleh pemerintah masih belum mencapai target yang diinginkan. Berikut anggaran penerimaan negara.

Tabel 1.2
Anggaran Penerimaan Negara (Milyar Rupiah)

Tahun	Anggaran Penerimaan Perpajakan	Penerimaan Bukan Pajak	Hibah	Jumlah	Persentase Penerimaan Pajak
2016	1.546.665	273.849	2.032	1.822.546	84,863%
2017	1.498.871	250.039	1.373	1.750.283	85,636%
2018	1.618.100	275.400	1.200	1.894.700	85,401%

Sumber: www.bps.go.id

Jika di bandingkan antara penerimaan yang ada di Tabel 1.1 dan anggaran penerimaan negara yang ada di Tabel 1.2 bisa disimpulkan bahwa meskipun penerimaan negara yang bersumber dari pajak di Indonesia dari tahun 2016 sampai tahun 2018 mengalami peningkatan secara berturut-turut setiap tahunnya,

tetapi peningkatan penerimaan pajak tersebut belum mencapai anggaran atau target yang ditentukan oleh pemerintah. Jumlah anggaran pada tahun 2016 sebesar Rp 1.546.665 milyar sedangkan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari pajak pada tahun 2016 hanya sebesar Rp 1.284.970,10 milyar. Dalam hal ini kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak harus ditingkatkan kembali agar anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah bisa tercapai.

Rakyat atau kelompok rakyat yang membayar pajak disebut dengan Wajib Pajak. Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Perpajakan (UU KUP) Pasal 1 ayat 2, Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut pertumbuhan Wajib Pajak dari tahun 2016-2018.

Tabel 1.3
Jumlah Wajib Pajak terdaftar

Jenis	2018	2017	2016
Badan	3.320.020	3.101.839	2.904.378
Orang Pribadi	38.651.308	35.491.280	32.957.424
Bendahara	508.157	497.778	478.038
Jumlah	42.479.485	39.090.897	36.339.840

(sumber : Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2018)

Berdasarkan gambar 1.3 yang bersumber dari Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak tahun 2018, terjadinya peningkatan Wajib Pajak dari Orang Pribadi, Badan, maupun Bendahara. Total Wajib Pajak yang semula 36.339.840

pada tahun 2016 menjadi 42.479.485 pada tahun 2018. Terlihat bahwa peningkatan jumlah Wajib Pajak ini bisa mempengaruhi penerimaan pajak yang ada di Indonesia.

Bisa dihipotesiskan bahwa jika jumlah Wajib Pajak meningkat berarti jumlah penerimaan juga meningkat. Belum tentu semua masyarakat yang menjadi Wajib Pajak melaporkan kewajibannya, ini bisa terlihat dari perkembangan penyampaian SPT Manual dan *E-Filing* dari Tahun 2016-2018

Tabel 1.4
Perkembangan Jumlah Penyampaian SPT

Tahun SPT Diterima	e-Filing	SPT Manual
2016	8.817.614	17.919.891
2017	10.875.117	15.179.738
2018	17.095.207	3.953.281

(Sumber: Direktorat Jenderal Pajak AR 2018)

Karena salah satu yang mempengaruhi penerimaan perpajakan adalah jumlah Wajib Pajak, Wajib Pajak yang terdaftar diharapkan patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Pemerintah selaku pemungut pajak harus memikirkan cara untuk membuat Wajib Pajak yang membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Salah satu cara yang bisa dilakukan pemerintah adalah reformasi perpajakan menggunakan aplikasi berbasis *online* dalam menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakannya untuk lebih

memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan aktivitas pelaporan kewajiban perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan Wajib Pajak akan meningkatkan penerimaan pajak di negara tersebut. Pajak merupakan suatu kewajiban yang dikenakan pada rakyat. Jika tidak melaksanakan kewajibannya tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Dapat dikatakan bahwa kewajiban ini dapat dipaksakan oleh pemerintah. Merupakan hal yang sangat mendasar bahwa dalam pemungutan pajak harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, karena dengan adanya peraturan perundang-undangan kekuatan pemungutan pajak disahkan oleh kesediaan rakyat melalui wakilnya (Rahayu, 2017).

Pada hakekatnya yang memikul beban pajak adalah rakyat, masalah *tax base* dan *tax rate* harus melalui persetujuan rakyat yang diwakili oleh lembaga perwakilan rakyat. Hasil persetujuan tersebut dituangkan dalam suatu undang-undang yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang dikenakan kewajiban perpajakan. Jika Wajib Pajak tidak memenuhi ketentuan kewajiban perpajakan maka Wajib Pajak dapat dikenakan tindakan hukum oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Fiskus selaku pemungut pajak dapat memaksakan Wajib Pajak untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017).

Menurut Halim *et al* pada tahun 2016, pajak memiliki dua fungsi, yaitu :

1. Fungsi *Budgetair*

Pajak memberikan sumbangan terbesar dalam penerimaan negara, kurang lebih 60-70 persen penerimaan pajak memenuhi postur APBN. Oleh karena itu, pajak

merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

2. Fungsi *Regulerend* (Mengatur)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :

- a. Memberikan insentif pajak (*tax holiday*) untuk mendorong peningkatan investasi di dalam negeri.
- b. Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- c. Pengenaan tarif pajak nol persen atas ekspor untuk mendorong peningkatan ekspor produk dalam negeri.

Menurut Resmi (2017), syarat pemungutan pajak dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

Menurut Resmi (2017), Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan yaitu :

1. *Official Assessment system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparat perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparat perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada aparat perpajakan. Contoh *official assessment system* adalah Pajak Bumi dan Bangunan(PBB) karena negara yang akan menentukan jumlah pajak PBB yang harus dibayarkan

masyarakat tiap daerah. Masyarakat tidak perlu lagi menghitung pajak terutang atas PBB melainkan hanya cukup membayar saja sesuai dengan ketentuan negara.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, mempunyai kejujuran yang tinggi, dan menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Contoh

3. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetor, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia.

Menurut Waluyo (2017), Pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Pajak menurut golongan atau pembebanan

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut sifat

Pembagian pajak menurut sifat dimaksudkan pembeda dan pembagiannya berdasarkan ciri-ciri prinsip yaitu :

- a. Pajak Subjektif, adalah pajak yang pemungutannya/pengenaannya berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

3. Menurut pemungut dan pengelolanya

- a. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak reklame, pajak hiburan.

Pajak-pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi :

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak (Resmi, 2017). Berikut ini adalah beberapa jenis penghasilan, yaitu :

1. Pajak Penghasilan Pasal 21

PPh 21 atau Pajak penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Subjek Pajak Dalam Negeri merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (Resmi, 2017). Berikut tarif pajak PPh Pasal 21 dan lapisan penghasilan kena pajaknya.

Tabel 1.5
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000	5%
Diatas Rp 50.000.000 sampai dengan Rp 250.000.000	15%
Diatas Rp 250.000.000 sampai dengan Rp 500.000.000	25%
Diatas Rp 500.000.000	30%

(Sumber: Undang-Undang PPh Pasal 17 ayat 1)

Di atas adalah lapisan Penghasilan Kena Pajak yang ditentukan oleh Undang-Undang. Untuk tarif PPh Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berlaku mulai Tahun 2010 berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebesar 25% (Pajak.go.id). Penghasilan dibawah lapisan yang telah disebutkan diatas disebut sebagai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PTKP ditentukan berdasarkan status Wajib Pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan. Status Wajib Pajak terdiri dari :

1. TK = Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
2. K = Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
3. K/I = Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga.

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi adalah sebagai berikut :

1. Rp 54.000.000 (Lima puluh empat juta rupiah) untuk Wajib Pajak Orang Pribadi;
2. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak

3. Rp 54.000.000 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
 4. Rp 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak tiga (tiga) orang untuk setiap keluarga.
- b. Pajak Penghasilan Pasal 23

PPh 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri (Orang Pribadi dan Badan) dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21. PPh Pasal 23 ini dibayar atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak Dalam Negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya (Resmi, 2017). Berikut tabel atas tarif Pajak Penghasilan 23

Tabel 1.6
Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23

Jenis Penghasilan	Tarif Pajak
Dividen, bunga, royalti, dan hadiah	15%
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dan imbalan sehubungan dengan jasa	2%

Pihak pihak yang termasuk pemotong PPh Pasal 23 yaitu :

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan perusahaan di luar negeri lainnya.
6. Orang Pribadi

c. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2

Pajak Penghasilan dapat dikelompokkan menjadi PPh yang bersifat final dan PPh bersifat tidak final. Pajak Penghasilan bersifat final artinya pajak penghasilan yang pengenaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak (Resmi, 2017). Pajak penghasilan bersifat final dikelompokkan sebagai berikut.

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
3. PPh Pasal 4 ayat 2 UU PPh.

d. Pajak Penghasilan Pasal 25

Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan (Halim *et Al*, 2016). Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang

harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang selanjutnya dikurangi dengan :

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dibagi dua belas atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (Wilayah Indonesia). Setiap Orang Pribadi, Perusahaan, maupun Pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Karena, pada dasarnya setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP), kecuali jika barang dan jasa tersebut dikecualikan dan diatur dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (online Pajak, 2019).

Dalam Pajak Pertambahan Nilai, dikenal istilah mengenai faktur pajak, pajak keluaran dan pajak masukan. Faktur pajak menurut Pasal 1 angka 23 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh

Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Pajak Keluaran menurut Pasal 1 angka 25 Undang-undang PPN adalah Pajak pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penjualan (online pajak, 2019). Setiap Pengusaha Kena Pajak diwajibkan membuat faktur pajak keluaran atau faktur yang diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak melakukan hal-hal sebagai berikut

- a. Saat penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)
- b. Saat penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP)
- c. Saat penerimaan pembayaran (dalam hal pembayaran diterima sebelum penyerahan BKP/JKP).
- d. Saat pembayaran termin (dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan)

Selain pajak keluaran, di dalam PPN juga dikenal istilah pajak masukan. Menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang PPh, Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena melakukan pembelian. Pajak Masukan dijadikan kredit pajak oleh Pengusaha Kena Pajak untuk memperhitungkan sisa pajak yang terutang (online pajak, 2018).

Saat ini, DJP juga telah membuat aplikasi sebagai sarana mempermudah melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak PPN melalui aplikasi *e-faktur*. Aplikasi *e-faktur* adalah aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk membuat faktur pajak.

Adanya aplikasi *e-faktur* memudahkan Pengusaha Kena Pajak membuat faktur pajak dengan format seragam yang sudah ditentukan DJP (online pajak, 2019).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak, dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017). Mengingat batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi adalah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan bagi Wajib Pajak badan adalah akhir bulan keempat tahun Pajak berikutnya, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan disampaikan belum dapat dihitung (Halim *et Al*, 2016).

Karena penerimaan pajak di Indonesia masih terbilang belum optimal, maka Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang dari awal berdiri sampai sekarang telah beberapa kali menjalankan agenda perubahan. Pada tahun 2002 pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak sampai sekarang berusaha memenuhi tuntutan zaman yang dinamis, dengan memperbaiki efisiensi dan efektifitas kinerja serta terus menerus meningkatkan penerimaan pajak dalam momentum modernisasi administrasi perpajakan di seluruh unit kerjanya (Nuraini, 2017). Salah satu efisiensi dan efektifitas kinerja Direktorat Jenderal Pajak adalah penyampaian SPT melalui *e-filing*.

Undang-Undang Pajak Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. *E-filing* merupakan aplikasi *online* yang digunakan Wajib Pajak dalam menyampaikan elektronik SPT (e-SPT) ke DJP melalui *website* resmi DJP, dengan registrasi terlebih dahulu untuk mendapatkan *Electronic Filing Identification Number (EFIN)*. Karena melalui sistem *online* sehingga bersifat *real time* bagi DJP sebagai destinasi informasi (Rahayu, 2017).

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak (WP) untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SPT itu sendiri dibedakan menjadi 2 yaitu, SPT Masa dan SPT Tahunan (Rahayu, 2017). Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT), SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak meliputi SPT PPh Orang Pribadi 1770 dan 1770S, dan SPT PPh Badan sedangkan SPT Masa adalah SPT untuk suatu Masa Pajak meliputi PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 22, SPT PPh Pasal 23, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, dan SPT Masa PPN dan PPnBM.

Menurut Rahayu (2017), fungsi Surat Pemberitahuan (SPT) dilihat dari Wajib Pajak, Pemotong atau Pemungut Pajak dan Pengusaha Kena Pajak adalah sebagai berikut :

1. Wajib Pajak Pajak Penghasilan

Sebagai sarana Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah pajak yang terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam satu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak;
- c. Harta dan kewajiban;
- d. Pemotongan/pemungutan pajak Orang atau Badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak.

2. Pengusaha Kena Pajak

Menurut Rahayu (2017), sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang :

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran;
- b. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

3. Pemotong/pemungut Pajak

Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung-jawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetorkan. SPT wajib diisi secara benar, lengkap, jelas dan harus ditandatangani. Dalam hal SPT diisi dan ditandatangani oleh

orang lain bukan Wajib Pajak, harus dilampiri surat kuasa khusus. Untuk Wajib Pajak Badan, SPT harus ditandatangani oleh pengurus/direksi.

Penyampaian SPT oleh Wajib Pajak dapat dilakukan:

1. Secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditentukan (*Drop Box*, Pojok Pajak, Mobil Pajak Keliling);
2. Melalui pos dengan pengiriman surat atau;
3. Dengan cara lain yaitu melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat atau *e-filing*;
4. Untuk SPT PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan formulir 1770S atau 1770SS, dapat menggunakan aplikasi pada situs DJP (www.pajak.go.id) berupa aplikasi *e-filing* (efiling.pajak.go.id)

Bukti penerimaan SPT untuk yang disampaikan :

1. Secara langsung adalah tanda penerimaan surat;
2. *E-filing* adalah bukti penerimaan elektronik;
3. Pos dengan bukti pengiriman surat adalah bukti pengiriman surat;
4. Perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan adalah tanda penerimaan surat.

Batas waktu penyampaian :

1. SPT Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa PPh Pasal 22, PPN, dan PPnBM yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yaitu secara mingguan paling lama pada hari kerja terakhir minggu berikutnya, dan SPT Masa PPh Pasal 22, PPN dan

PPnBM yang dipungut oleh Bendahara paling lama 14 hari setelah Masa Pajak berakhir. Untuk Wajib Pajak dengan kriteria tertentu yang melaporkan beberapa Masa Pajak dalam satu SPT Masa, paling lama 20 hari setelah berakhirnya Masa Pajak terakhir.

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak, sedangkan untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut Surat Edaran Nomor SE-39/PJ/2015, Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, selanjutnya disingkat SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak untuk meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan kepada Wajib Pajak terhadap dugaan belum dipenuhinya kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Tanggal dikirim SP2DK adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal yang tercantum dalam bukti pengiriman melalui jasa ekspedisi atau jasa kurir, atau tanggal faksimili. Proses permintaan penjelasan kepada Wajib Pajak dilakukan dengan menggunakan SP2DK dengan cara :

- a. Mengirimkan SP2DK kepada Wajib Pajak; dan/atau
- b. Menyampaikan langsung kepada Wajib Pajak melalui kunjungan (Visit).

Penentuan cara penyampaian SP2DK kepada Wajib Pajak merupakan kewenangan Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mempertimbangkan jarak, waktu, biaya, dan pertimbangan lainnya.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1868 menjelaskan bahwa akta notaris adalah suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya. Akta Notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH Perdata Pasal 1866, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.

Menurut Zulfikar (2016), saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak (badan usaha) dalam suatu perusahaan atau Perseroan Terbatas. Adapun manfaat yang diperoleh para investor dengan menanamkan modalnya pada saham yaitu berupa dividen dan *capital gain*. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sedangkan *capital gain* merupakan selisih antara harga beli dan harga jual dalam perdagangan saham (Abi, 2016).

Menurut (Dictio.id, 2017), *Fishbone* Diagram atau diagram tulang ikan atau *Ishikawa* diagram adalah salah satu metode untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah atau kondisi. Sering juga diagram ini disebut dengan diagram sebab-akibat atau *cause effect* diagram. Diagram *Fishbone* ini dapat digunakan jika:

- a. Mengenali akar penyebab masalah atau sebab mendasar dari akibat, masalah, atau kondisi tertentu.
- b. Memilah dan menguraikan pengaruh timbal balik antara berbagai faktor yang mempengaruhi akibat atau proses tertentu.
- c. Menganalisa masalah yang ada sehingga tindakan yang tepat dapat diambil manfaatnya dengan menggunakan diagram *Fishbone* ini.
- d. Membantu menentukan akar penyebab masalah dengan pendekatan yang terstruktur.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2018 pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1, Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja suatu entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomik. Komponen laporan keuangan lengkap terdiri dari:

1. Laporan Posisi Keuangan pada akhir periode;
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan komprehensif lain selama periode;
3. Laporan Perubahan Ekuitas selama periode;
4. Laporan Arus Kas selama periode;
5. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lain;
6. Informasi komparatif mengenai periode terdekat sebelumnya;

7. Laporan Posisi keuangan pada awal periode terdekat ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

1.2.1 Maksud Kerja Magang

Pelaksanaan kerja magang dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat langsung dengan kondisi dunia kerja guna meningkatkan, memperluas, dan menetapkan pemahaman mahasiswa tentang dunia kerja yang sesungguhnya. Di dalam praktek kerja magang ini, mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang diterima selama perkuliahan ke dunia kerja sehingga kecakapan dan keterampilan mahasiswa dapat ditingkatkan.

1.2.2 Tujuan Kerja Magang

Kerja magang dilaksanakan dengan tujuan agar mahasiswa memiliki kemampuan secara profesional untuk :

- a. Dapat mengaplikasikan serta menerapkan konsep-konsep yang telah dipelajari di lingkungan universitas dengan praktek;
- b. Memahami penggunaan aplikasi e-SPT untuk PPN, PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 25;
- c. Memahami peng-identifikasian masalah yang terjadi didalam suatu perusahaan dengan menggunakan diagram *fishbone*
- d. Memahami penggunaan teknik analisis arus kas untuk menilai kewajaran harta Wajib Pajak Orang Pribadi.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Kerja magang dilakukan mulai tanggal 10 Juni 2019 sampai dengan 9 Agustus 2019 di OFISI *Tax and Management Advisory* bagian *junior staff* yang berlokasi di AKR Tower lantai 17 Unit A Jalan Panjang No.5 Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Jam kerja selama magang, yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at pukul 08.30-17.30.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.2.1 Tahap Pengajuan

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara, prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut :

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang (Form KM-01) sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi dan formulir KM-02 dapat diperoleh dari program studi.
- b. Surat pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
- c. Program studi menunjuk seorang dosen *full time* pada Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang;
- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi;

- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang ditolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin a, b, c dan d, dan izin baru akan diterbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan diterima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada Koordinator Magang;
- g. Mahasiswa dapat memulai melaksanakan Kerja Magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;
- h. Apabila mahasiswa memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Realisasi Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang.

1.3.2.2 Tahap Pelaksanaan

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun 2016/2017, prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelum mahasiswa melakukan Kerja Magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri pertemuan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan.
- b. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis dilapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan

kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berinteraksi dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa yang mengulang proses kerja magang dari awal.

- c. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja Magang.
- d. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep, dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.
- e. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- f. Sewaktu mahasiswa menjalani proses Kerja Magang, Koordinator Kerja Magang beserta dosen pembimbing Kerja Magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan secara lisan maupun tertulis.

1.3.2.3 Tahap Akhir

Berdasarkan buku panduan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara tahun akademik 2016/2017, prosedur pelaksanaan kerja magang adalah sebagai berikut :

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankannya selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan Kerja Magang kepada pembimbing lapangan dan meminta pembimbing lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang (Form KM-06).
- d. Pembimbing lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang (Form KM-04) terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Pembimbing lapangan memberikan surat keterangan perusahaan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya.
- f. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh pembimbing lapangan di perusahaan/instansi untuk dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang / melalui mahasiswa yang bersangkutan dalam amplop tertutup untuk disampaikan kepada Koordinator magang.

- g. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang.
- h. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggung-jawabkan laporannya pada ujian kerja magang.